

STRATEGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM MEMENANGKAN SUARA PEMILIH MINORITAS PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019

Fahmy Iss Wahyudy¹, Widya Setiabudi Sumadinata², Leo Agustino³

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: fahmiissw@gmail.com

²Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: wsetiabudi@yahoo.com

³Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: leoagustino@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung dalam meraih suara pemilih minoritas pada momentum Pemilihan umum Tahun 2019. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan PSI dalam menembus parlemen di Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pemilih dengan latar belakang minoritas, baik dari kelompok keagamaan maupun etnis. Pada prakteknya, upaya PSI dalam meraih simpati kelompok pemilih minoritas tersebut berpijak pada beberapa program kerja dan agenda kampanye. Pada tingkatan nilai, narasi yang dikembangkan oleh partai terkait toleransi dan inklusivisme mendorong mereka untuk semakin populer di kalangan pemilih minoritas. Pada tingkatan praksis politik, kebijakan partai untuk mendelegasikan calon legislatif berlatar belakang minoritas di seluruh daerah pemilihan yang dipertandingkan, dapat secara efektif memenangkan dukungan dari banyak kelompok minoritas yang merasa terwakili oleh keberadaan para calon legislatif tersebut.

Kata Kunci: Strategi politik; Partai Solidaritas Indonesia; Pemilihan umum; Legislatif

ABSTRACT

This study seeks to describe the strategy used by the Bandung City Indonesian Solidarity Party (PSI) in gaining minority voter votes at the momentum of the 2019 general election. This study was designed using qualitative methods. The results of this study indicate that the success of PSI in penetrating the parliament in Bandung City cannot be separated from the contribution of voters with minority backgrounds, both from religious and ethnic groups. In practice, PSI's efforts to gain sympathy for these minority voters rests on several work programs and campaign agendas. At the value level, the narratives developed by parties regarding tolerance and inclusivism encourage them to become increasingly popular with minority voters. At the political praxis level, the party's policy of delegating candidates from minority backgrounds to all contested electoral districts can effectively win support from many minority groups who feel represented by the presence of these legislative candidates.

Keywords: Political Strategy; Partai Solidaritas Indonesia; Legislative Election

PENDAHULUAN

Dalam konteks kemenangan politik, setiap partai atau pun kandidat yang terlibat dalam arena persaingan pemilihan umum niscaya merancang strategi sebaik mungkin untuk mendapatkan dukungan dari para pemilik suara. Sebagai partai yang baru pertama kalinya mengecap

keikutsertaan dalam pemilu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkreasikan strategi untuk menggarap segmentasi pemilih secara lebih spesifik. Partai besutan anak-anak muda ini secara terbuka menasar kelompok minoritas, pemuda dan kelas menengah perkotaan sebagai kolam elektoral untuk meningkatkan

raihan suara partai (PSI.id, 2020).

Dalam *platform* politiknya, PSI menjanjikan bahwa partainya akan memperjuangkan kemajuan Indonesia bagi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali, selain juga terus menerus memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan, anak, difabel dan kaum Tionghoa (PSI.id, 2019). Dengan berbekal Ketua Umum Grace Natalie yang mewakili 3 kelompok minoritas yakni perempuan, etnis tionghoa dan beragama kristen protestan, PSI muncul dengan citra sebagai Partai yang memiliki perhatian besar terhadap kelompok minoritas (Kompas, 2018). Selama sepak terjangnya menyongsong Pemilihan Umum 2019, PSI muncul dengan gagasan-gagasan yang membawa angin segar bagi kelompok terpinggirkan dengan mengangkat isu-isu minoritas dalam kampanyenya. Sebagai Ketua Umum, Grace Natalie dan beberapa pengurus DPP nya yang lain seperti Tsamara Amani dan Raja Juli Antoni muncul dengan penolakan keras terhadap Peraturan Daerah (Perda) berbasis agama, bagi PSI Perda berbasis agama terbukti diskriminatif terhadap kaum minoritas khususnya perempuan, bahkan lebih lanjut Grace Natalie menyebutnya sebagai bagian dari upaya pelacuran agama atau agama yang dilacurkan

Menurut Hanafi (2018), partai-partai baru memang akan mencoba menempatkan segmentasi pemilih dengan latar belakang usia, pekerjaan, dan latar belakang sosial secara lebih spesifik, partai-partai tersebut nampak membatasi diri untuk meraih pasar pemilih yang lebih luas. Dalam konteks politik elektoral, hasil riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) Deny JA, menunjukkan bahwa angka base pemilih minoritas di Indonesia mencapai angka 15% dari total seluruh pemilih (tirto, 2019). Angka populasi 15% tentu sangat signifikan, apalagi jika segmentasi dukungan tersebut dapat secara solid diarahkan pada kandidat atau partai tertentu.

Dalam pendekatan teoritik, menurut Caportori (dalam Komnas Ham, 2016) minoritas adalah sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit, dibandingkan seluruh populasi suatu negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara dengan karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya, dan menunjukkan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas, yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka. Minoritas atau ras berdasarkan kelompok agama memang selalu digambarkan oleh pengelompokan sejumlah orang beragama tertentu, yang secara kuantitatif (nominal/matematis) maupun kualitatif (peran dan status sosial) berbeda dengan agama kelompok ras dominan atau mayoritas (Liliweri, 2005).

Meskipun menysasar target secara lebih spesifik, strategi yang digunakan oleh PSI pada kenyataannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilu pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa PSI hanya memperoleh 2.650.361 suara atau setara dengan 1,89% suara nasional, yang dapat diartikan bahwa partai ini tidak mampu melewati ambang batas *parliamentary threshold* yang berada di angka 4%. Namun demikian, raihan suara partai di level nasional tidak sepenuhnya mencerminkan raihan suara partai di level yang lebih rendah. Meskipun secara nasional PSI gagal berkiprah di parlemen, pada beberapa wilayah tertentu PSI berhasil mengantarkan calon legislatifnya menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), fenomena tersebut salah satunya terjadi pada pemilu legislatif di Kota Bandung. Dari jumlah 50 kursi yang terbagi dalam enam daerah pemilihan, PSI berhasil meloloskan 3 calon legislatif mereka menuju kursi DPRD Kota Bandung (Detik, 2019).

Tabel.1 Perolehan Kursi Partai Politik Pada DPRD Kota Bandung Tahun Periode 2019-2024

No Urut	Partai	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Total	Caleg Terpilih
1	PKB	8	8	7	9	7	11	50	2
2	GERINDRA	8	8	7	9	7	11	50	8
3	PDI-P	8	8	7	9	7	11	50	7
4	GOLKAR	8	8	7	9	7	11	50	6
5	NASDEM	8	8	7	9	7	11	50	5
6	GARUDA	5	7	5	9	6	8	40	0
7	BERKARYA	8	7	6	9	6	10	46	0
8	PKS	8	8	7	9	7	11	50	13
9	PERINDO	8	8	7	9	7	11	50	0
10	PPP	8	8	7	9	7	11	50	1
11	PSI	6	5	5	9	6	7	35	3
12	PAN	8	8	7	9	7	10	49	0
13	HANURA	8	8	7	9	7	11	50	0
14	DEMOKRAT	8	8	7	9	7	11	50	5
15	PBB	8	7	7	9	7	11	49	0
								719	50

Sumber : Data diolah dari KPU Kota Bandung

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap kursi parlemen Kota Bandung diperebutkan oleh lebih dari 14 orang kandidat. Secara matematis, Partai dengan jumlah calon legislatif yang lebih banyak akan memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan kursi di DPRD. Akan tetapi PSI yang hanya mendelegasikan 35 orang calon legislatif, yang artinya paling sedikit di antara partai-partai lain justru mampu mencatatkan raihan 3 kursi. Dalam kasus Kota Bandung, PSI juga berhasil mencatatkan prestasi sebagai satu-satunya partai baru yang langsung berhasil menembus parlemen pada kesempatan pertama. Salah satu hal lain yang menarik untuk dicermati dari keberhasilan PSI di Kota Bandung adalah terkait status dari ketiga calon legislatif terpilihnya yang merupakan representasi dari 2 kelompok minoritas sekaligus, yakni etnis tionghoa dan beragama kristen. Ketiganya adalah Yoel Yosaphat dari daerah pemilihan 1, Erick Darmadjaya dari daerah pemilihan 2, dan Christian Julianto Budiman di daerah pemilihan 6 Kota Bandung.

Jika mengacu pada data demografis yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang jumlah penduduk berdasarkan

agama di Kota Bandung, para legislator PSI yang dinyatakan terpilih mendapatkan dukungan yang konstan pada wilayah-wilayah yang sebagian besarnya dihuni oleh kelompok minoritas. Ketiga dapil yang menjadi basis dukungan suara bagi PSI tersebut merupakan wilayah-wilayah yang identik sebagai kawasan pecinan di Kota Bandung, dimana sebagian besar penduduk etnis tionghoa bertempat tinggal (Kunto, 1984). Peta demografis pada hakikatnya memang memiliki nilai strategis secara politik. Data demografis yang akurat dan terpercaya akan memberikan legitimasi politik yang kuat pada para pemimpin politik yang memenangkan kompetisi politik melalui pemilu (Ambardi, 2016). Dalilnya, bahwa dalam berbagai literatur standar yang menyajikan panduan kampanye, analisis demografis menjadi basis dalam merancang strategi pemenangan pemilu (Burton, 2010).

Dalam konteks pemilu di Kota Bandung, PSI mampu menciptakan raihan elektoral yang positif melalui pemanfaatan isu perlindungan terhadap minoritas dan gagasan progresif tentang toleransi di tengah kecenderungan partai-partai politik lain yang berupaya merebut

semua segmentasi pemilih (*catch all the party*). Strategi tersebut sejalan dengan apa yang acapkali disuarakan oleh para pengurus pusat PSI terkait gagasan-gagasan yang membawa angin segar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan dengan mengangkat isu-isu minoritas dalam berbagai agenda kampanyenya. Salah satu hal yang dapat mencerminkan agenda tersebut dapat dilihat dari platform PSI terkait Politik, Hukum dan HAM, secara eksplisit PSI telah mendaraskan bahwa partainya akan memperjuangkan kemajuan Indonesia bagi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, selain juga akan terus menerus memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan, anak, difabel dan kaum Tionghoa (PSI, 2018).

Gunawan (2017) dalam penelitiannya melihat tentang pentingnya partai untuk merancang strategi politik sebagai kerangka rencana dalam upaya untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Pada prakteknya, partai politik menjalankan strategi ofensif melalui beberapa agenda, diantaranya adalah perluasan pasar atau *market politics* yang bertujuan untuk membentuk ceruk basis kelompok pemilih baru di samping basis suara tetap yang sebelumnya telah ada. Sementara, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2019) menunjukkan bagaimana kandidat yang terlibat dalam agenda pemilihan umum merumuskan strategi politik melalui segmentasi dan memanfaatkan *trend* yang tengah digandrungi oleh para pemilih muda. Melalui pemanfaatan *trend* tersebut, kandidat dapat meraup insentif elektoral yang besar.

Adapun kebaharuan yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan secara mendalam bagaimana strategi DPD PSI Kota Bandung dalam memenangkan suara pemilih kelompok minoritas pada pemilihan umum tahun 2019. Pada umumnya, masih sedikit sekali kajian yang menempatkan minoritas sebagai base pemilih potensial

yang dapat secara signifikan meningkatkan raihan suara kandidat atau pun partai politik, sementara ini istilah minoritas masih dimaknai dalam konteks kuantitatif, yakni jumlahnya yang sedikit.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil studi kasus (*case study*) terkait strategi PSI dalam memenangkan suara pemilih minoritas di kota Bandung pada Pemilu tahun 2019. Penelitian kualitatif merupakan metode analisis data secara induktif yang memungkinkan peneliti untuk mencitrakan pola-pola, kategori-kategori, dengan teknik mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak, mengembangkan konstruksi, dan interpretasi atas apa yang peneliti lihat, dengar dan pahami (Margret, 2014). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menganggap bahwa pendekatan kualitatif memiliki kesesuaian dan perangkat metodologis yang cocok dalam menganalisis berbagai fenomena di lapangan secara komperhensif. Terkait dengan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini, peneliti melakukan beberapa hal yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992) diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan melalui sumber yang sudah ada serta relevan dengan subjek penelitian seperti Buku, Jurnal, Tesis dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan triangulasi agar kemudian dapat membandingkan, mengecek kemudian menyimpulkan secara lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik

Partai politik merupakan senyawa yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup sistem demokrasi modern, di sisi lain institusi partai politik juga memegang peranan yang instrumental dalam menguatkan

kinerja demokrasi yang sehat dan substantif. Sentralitas partai politik dalam atmosfer demokrasi juga dinyatakan secara tegas oleh Clinton Rossiter (1960) yang menekankan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai politik. Dalam konteks Indonesia sendiri, partai politik tetap menjadi satu-satunya alternatif untuk memasuki ruang politik formal.

Kajian terkait partai politik senantiasa menjadi magnet yang kuat bagi banyak ilmuwan sosial dengan berbagai latar belakang, termasuk yang berbasis di dalam maupun luar negeri. Salah satu yang memberikan definisi terkait partai politik adalah Huckson (1984), menurutnya partai politik adalah: *Political party is an autonomous group of citizens having the purpose of making nominations and contesting election in hope of gaining control over governmental power through the capture of public offices and the organization of the government.*

Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan. Kemudian, Carl J Friedrich dalam Budiarto (2008) melihat partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan. Dalam Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik menjadi salah satu bagian terpenting dari pembangunan institusi-institusi demokrasi pasca orde baru, Upaya untuk melaksanakan pemilu yang adil dan jujur dibarengi juga oleh kemunculan partai-partai politik baru diluar Golkar, PPP dan PDI. Pemilu yang diselenggarakan secara periodikal setiap 5 tahun sekali tersebut selalu memunculkan partai-partai baru dalam lintasan kompetisi. Pada perhelatan pemilu tahun 2019, lahir beberapa partai politik baru yang mencoba peruntungan politiknya seperti Partai Garuda, Berkarya, Perindo dan partai yang menjadi subjek dari penelitian ini yakni, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI secara resmi berdiri pada tanggal 16 November 2014, kemudian pada tanggal 16 Desember 2014 Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ide pendirian PSI tidak bisa dilepaskan dari fenomena keterpilihan Joko Widodo pada Pilpres tahun 2014. Kondisi ini seiring sejalan dengan kekecewaan para pendiri PSI terhadap proses reformasi partai politik yang dianggap tidak menunjukkan grafik signifikan. Para pendiri PSI menilai Joko Widodo adalah anak kandung demokrasi. Jokowi-sebagaimana Joko Widodo disapadinilai sebagai representasi pribadi dan warga negara biasa yang tidak memiliki ikatan dengan keluarga berlatar belakang elit politik, namun berhasil menjadi pemimpin di semua jenjang pemerintahan dari level Walikota sampai Presiden sekaligus menjadikannya sebagai figur pemimpin yang diklaim tidak lahir dari rahim oligarki politik maupun birokrasi yang telah matang (PSI.ID, 2018).

Dalam kiprahnya sebagai partai politik baru, PSI kerap kali muncul dengan gagasan-gagasan yang sensitif dalam percaturan politik di Indonesia. Salah satu yang paling mencolok dan mencuri perhatian adalah penolakannya terhadap Perda (Peraturan Daerah) yang berbasis pada agama tertentu,

dalam pandangan PSI Perda dengan kualitas tersebut terbukti telah sangat diskriminatif terhadap kaum minoritas. Melalui juru bicaranya, PSI mengungkap situsasi yang paradoksal dimana banyak partai dengan slogan nasionalis di berbagai daerah yang justru menjadi pendukung perda syariah demi alasan elektoral (Kompas, 2018).

Sebagai komitmen partai, ide-ide kebaruan terkait kesetaraan dan keberagaman ditekstualisasikan ke dalam buku saku kader yang berjudul ABC PSI. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa partai memiliki 9 prinsip yang diantaranya: (1) Partai modern: terbuka, demokratis, dipimpin, berbasis *platform*, budaya partisipasi, berkemajuan; (2) Kemajemukan/*pluralism*; (3) Demokrasi substantif/Demokrasi Sosial; (4) Demokrasi Ekonomi; (5) Kesetaraan dan Keadilan Gender; (6) Negara Kesejahteraan; (7) Hak Asasi Manusia; dan (8) Penghormatan Ekologis.

Langkah PSI dalam membentuk kepengurusan yang solid di level nasional kemudian berlanjut dengan proses konsolidasi di level provinsi dengan melakukan pembentukan kepengurusan di jenjang kabupaten dan kota. PSI nampak berupaya membentuk struktur kepengurusan di seluruh provinsi termasuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat, selepas proses pembentukan DPW usai, PSI kemudian melakukan penggalangan lanjutan dengan membentuk kepengurusan setidaknya 75% kota/kabupaten, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PSI Kota Bandung pada tahun 2015.

PSI melalui solgan-slogan yang identik dengan tema anti intoleransi diprediksikan oleh para pengamat tidak akan mampu berbuat banyak di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, mengingat kecenderungan *landscape* politik yang justru tengah berlawanan dengan tema yang disusung oleh PSI. Sebagai salah satu bahan perbandingan, data yang dirilis oleh Komnas HAM pada tahun 2016 menyebut Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah aduan terbanyak atas

pelanggaran kebebasan agama di Indonesia (Tirto, 2017). Fakta lainnya menyebut bahwa secara elektoral, Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat yang heterogen dari berbagai etnis, ras dan agama tertentu mau tidak mau sangat rawan terkena imbas dari narasi besar politik identitas dan politisasi SARA yang terjadi pada perhelatan pemilu tahun 2019 (Bawaslu, 2019).

Menurut penuturan Yoel Yosaphat, Anggota Legislatif terpilih dari PSI Kota Bandung. Desain politik dan komentar kontroversial para pengurus pusat PSI yang demikian justru memberikan efek popularitas ke partai di level daerah, pada sisi yang lain *tagline* anti intoleransi dianggap juga memiliki pengaruh yang besar terhadap orientasi memilih kelompok minoritas. Pada kesempatan yang berbeda, Christianto Julianto, Anggota Legislatif terpilih PSI yang lainnya tidak menampik bahwa sebagian besar pemilihnya juga merupakan kelompok minoritas, baginya hal tersebut merupakan reaksi terhadap citra PSI yang pro terhadap pluralisme dan kebhinekaan. Melalui sudut pandang ini, tidak mengherankan jika sebagian besar legislator terpilih dari PSI memiliki latar belakang dari kelompok minoritas. Temuan berdasarkan hasil observasi di lapangan mengkonfirmasi bahwa seluruh legislator PSI di Kota Bandung berasal dari kelompok yang terkategori minoritas.

Meski telah berhasil mengantarkan 3 calon legislatifnya melenggang menuju parlemen, kinerja organisasi Partai di level DPD Kota Bandung masih belum dapat dikatakan optimal. Bongkar pasang kepengurusan dan kesulitan lainnya terkait pemenuhan syarat minimal kepengurusan sebesar 50% dari jumlah kecamatan di Kota Bandung sebagai bagian dari pendaftaran kada KPU menjadi beberapa indikator masih lemahnya proses pelembagaan partai dalam tubuh partai. Bahkan, menurut Irfan Cahyo Narbowo, selaku Plt Ketua DPD PSI Kota Bandung, guna memenuhi syarat keanggotaan dan kepengurusan, mereka mensiasatinya dengan mencari 3 pengurus

di lima belas kecamatan untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Bahkan, tidak jarang struktur kepengurusan tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Pada sisi yang lain, partai politik tetap menjadi satu-satunya titik masuk paling penting bagi warga negara untuk terlibat dalam formal. Namun, dalam setidaknya dua dekade ke belakang, beberapa perubahan penting telah terjadi dalam *landscape* politik di Indonesia. Sebagai data pembanding, survei menunjukkan suatu penurunan yang dramatis, dengan 86% mengatakan bahwa mereka merasa “dekat” dengan sebuah partai tertentu pada tahun 1999, lalu jumlah tersebut tenggelam menjadi hanya 15% pada tahun 2014 (Muhtadi, 2018). Dengan kondisi demikian, semakin menurunnya kapasitas mobilisational partai menjadi konsekuensi logis dari semakin berjaraknya partai politik dengan aktivitas sosial masyarakat. Aspinall dan Berenschot memberikan pendapatnya bahwa karakter yang mencolok dari politik pemilihan umum pada masa pasca Orde Baru adalah peran partai politik yang makin mengecil, ketergantungan pada jejaring sosial dan posisi serta perang penting aparatus pemerintah (Aspinall & Berenschot, 2019). Tidak mengherankan jika para kandidat yang didelegasikan oleh partai sekalipun harus meretas jalan-jalan baru untuk mengakses para pemilih, alih-alih hanya mengandalkan partai politik sebagai institusi satu-satunya dalam memenangkan kompetisi pemilihan umum.

1. Strategi Pemenangan dalam Pemilu

Dalam kepustakaan ilmu politik, strategi selalu memiliki korelasi yang kuat dengan agenda perebutan kekuasaan, sebagaimana yang diuraikan oleh Robson (1954 : 24) bahwa

“Political Science is concerned with the study of power in society, centres on the struggle to gain or retain power;

to exercise power or influence over others”

Dalam penjelasan tersebut, studi ilmu politik diantaranya selalu terkait dengan konteks kekuasaan dalam tatanan masyarakat, sehingga menjadi niscaya bagi terjadinya dinamika dalam proses meraih dan atau pun merebut kekuasaan. Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politik yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik. Maka inilah yang menjadi *output* penting strategi politik yang menentukan pihak mana yang akan dipilih oleh para pemilih (Adman, 2004).

Seluruh strategi disusun sebagai tahapan-tahapan bagi partai politik untuk merebut, mempengaruhi dan merekrut setiap individu yang akan dilibatkan. Dengan demikian, partai politik dapat memenangkan sebuah pemilihan umum dan memenangkan setiap calon-calon yang diajukannya (Schroder, 2013). Dalam berbagai arena pertarungan politik formal setiap partai dan kandidat memerlukan strategi politik untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan, sejalan dengan aksioma bahwa tidak ada satu partai pun yang menghendaki kekalahan, bahwa dalam praktiknya seluruh partai dibentuk untuk meraih kemenangan.

PSI sebagai salah satu dari 4 partai baru yang dinyatakan lolos untuk berkompetisi pada pemilu 2019 sejatinya belum memiliki modal elektoral yang bagus untuk lolos menuju parlemen, Tiga lembaga survei sekaligus yakni Litbang Kompas, Charta Politica dan Vox Populi memprediksikan bahwa elektabilitas PSI tidak akan melebihi angka 1% (Kompas, 2019). Kondisi tidak ideal tersebut mendorong PSI untuk menyusun perencanaan dan manajemen organisasi yang kuat agar internal partai dapat memetakan data pemilih kemudian merumuskan program berdasarkan solusi dari berbagai permasalahan.

Dengan demikian, strategi politik yang kemudian dirumuskan harus memiliki kesesuaian dengan dinamika kondisi masyarakat agar efektif mempengaruhi *voters* untuk memberikan hak pilihnya. Meskipun perkembangan pemilu yang didorong oleh serangkaian kebijakan yang membelokan sistem pemilihan umumnya menjaduh dari sistem yang berfokus pada partai tetapi sebaliknya menggerakkan pada sistem yang berpusat pada calon (Aspinall, 2019), Partai tetap dianggap memegang peranan penting dalam sebuah penyusunan strategi, terutama dalam konteks pengorganisasian. Untuk bertarung dalam pemilu 2019 PSI menyusun strategi yang bertumpu pada beberapa hal yang oleh Schroder (2013) diklasifikasikan pada hal yakni popularitas, citra serta dukungan internal.

Pertama adalah Popularitas, dimana partai dan para kandidatnya harus memperhatikan sampai sejauh mana mereka dikenal oleh masyarakat. Dimensi kausalitas yang menyatakan bahwa semakin tinggi popularitas kandidat, maka akan semakin mudah untuk diterima oleh masyarakat. Dalam konteks pembangunan popularitas, PSI nampaknya tidak banyak menemui kesulitan berarti, malahan nampaknya aspek ini yang menjadi tumpuan PSI untuk mendulang suara. Beberapa figur populer yang menjadi bagian inti dari partai memang sudah dikenal memiliki popularitas yang tinggi, diantaranya Grace Natalie, Giring Ganessa dan Isyana Bagus Oka. Secara umum, popularitas partai yang tinggi juga diakui oleh Irfan Cahyo Narbowo, menurutnya popularitas PSI di level pusat memberikan dampak yang signifikan terhadap raihan suara di daerah, dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut sangat membantu proses kampanye di daerah, dimana para pengurus partai dan caleg-caleg yang turun ke lapangan tidak lagi direpotkan dengan tugas mendasar untuk mengenalkan PSI pada para pemilih.

Kedua adalah citra, setiap partai yang hendak berkontestasi dalam pemilihan umum memerlukan citra yang positif di hadapan para pemilih. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa para pemilih membutuhkan gambaran mengenai partai dan program yang ditawarkan, kemudian nilai yang membedakan partai tersebut dengan partai lainnya. Selama perhelatan pemilu tahun 2019, PSI mencitrakan dirinya sebagai partai yang progresif dengan berbagai agenda pembaharuan, mulai dari pola rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, mengakomodasi anak-anak muda di bawah usia 45 tahun untuk mengisi 50% struktur partai di berbagai tingkatan sampai, menjanjikan pembentukan aplikasi pemantau kinerja legislator. Di samping berbagai hal tersebut, PSI di berbagai daerah termasuk salah satunya Kota Bandung sangat identik dengan citra pluralistik dan kebhinekaan, meskipun karena 2 hal tersebut juga lah PSI secara nasional gagal melenggang ke parlemen (JPNN, 2019).

Ketiga adalah dukungan internal, dalam berbagai literatur politik dikemukakan bahwa kemenangan akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh soliditas internal organisasi. Untuk memenuhi aspek ini PSI berkeinginan membetuk struktur DPW dan DPD di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian struktur DPW dan DPD tersebut diinstruksikan untuk sesegera mungkin membentuk struktur kepengurusan di berbagai kecamatan, sampai pada pemilu 2019 dihelat DPD PSI Kota Bandung telah berhasil membentuk kepengurusan di 19 kecamatan dengan struktur yang meliputi ketua, sekretaris dan bendahara. Terbentuknya struktur di berbagai level juga dibarengi oleh pembentukan badan-badan partai, salah satunya adalah bappilu (Badan Pemenangan Pemilu).

Memaksimalkan Pola Kampanye Kreatif

Kampanye politik dalam arena kontestasi pemilihan umum sejauh ini telah banyak mengalami fase yang transformatif,

arus perkembangan zaman telah meniscayakan partai politik memiliki kecerdasan dan kreatifitas dalam menyusun dan mengemas pesan kampanye agar efek terbujuk dapat terjadi pada kelompok sasaran kampanye. Dengan catatan bahwa kampanye tetaplah memiliki esensi sebagai ajang bagi partai politik maupun perorangan untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suaranya kepada mereka saat pencoblosan (Lileker dan Negrine, 2007).

Semenjak awal keberdiriannya pada tahun 2014, PSI terus menerus berupaya menanamkan citra sebagai partai yang demikian ke dalam benak pemilih. Di tengah kebekuan cara berkampanye politik yang menekankan kekuatan figur ketua umum atau glorifikasi terhadap kejayaan di masa lalu, PSI tiba-tiba muncul dengan konsep mendisrupsi cara berkampanye politik di dalam negeri, dengan cara yang unik dan nyentrik. Resep politik tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk, misalnya adalah pengubahan terminologi Kantor DPP menjadi *basecamp*, atau juga panggilan bertendensi egaliter ‘Bro-Sis’ untuk mengganti sapaan ‘Bapak-Ibu’. Menurut Furqon AMC, ketua DPW PSI Jawa Barat, konsep-konsep segar tersebut lahir dari hasil analisa partai terhadap kebutuhan untuk menarik simpati elemen kelas menengah yang tidak terlalu menyukai format politik yang bersifat normatif dan kaku.

PSI melakukan terobosan kreatif pertamanya melalui meluncurkan aplikasi ‘Solidaritas’ yang berfungsi memantau kinerja seluruh anggota dewan dari PSI. Aplikasi tersebut diujicobakan kepada para pemilih dengan klaim akan menjadi booster agar para wakil rakyat dapat bekerja lebih keras. Penggunaan inovasi teknologi untuk transparansi dan kinerja politisi ini tentu menjadi panorama baru dalam atmosfer politik Indonesia. Seturut dengan agenda

DPP yang menghendaki *image* sebagai partai yang inovatif dan kreatif, DPD PSI Kota Bandung merancang strategi kampanye yang memiliki kecenderungan lebih kreatif dibandingkan dengan partai lain, mulai dengan membuat aplikasi digital, melakukan *fundraising*, membuat gambar yang nyeleneh di alat peraga kampanye, bergerilya ke tempat-tempat perbelanjaan hingga melakukan ‘perang udara’ melalui media sosial.

Christianto Budiman, salah satu legislator terpilih PSI merubah pakem konsolidasi sumber pendanaan kampanye, jika pada umumnya para kandidat harus menyiapkan dana yang besar untuk berkampanye, yang bersangkutan justru mengajak para konstituennya untuk melakukan aktifitas *fundraising* atau pengumpulan dana selama kampanye berlangsung. Ia mengajak keluarga, sahabat, kerabat bahkan konstituennya sendiri untuk menyumbang dalam bentuk apapun, dana maupun logistik agar dapat secara bersama-sama mengawal program-program politik yang telah ia susun. Dengan biaya kampanye yang secara keseluruhan hanya mencapai 15 Juta, Christian mampu lolos dari dapil VI dengan raihan 5.609 suara.

Demi meraih dukungan dari elemen pemilih minoritas yang sebelumnya oleh peneliti ditulis tengah terombang ambing dengan kekhawatiran akan menguatnya politik identitas pada pemilu tahun 2019, PSI mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan ‘Safari Toleransi’ di salah satu mall di jalan Pasteur Kota Bandung untuk mengkampanyekan isu keberagaman dan kesetaraan warga negara. Terdapat tiga pembahasan krusial dalam safari toleransi tersebut, yang pertama PSI akan menjaga ideologi Pancasila dari ancaman kelompok pro khilafah, kedua PSI akan senantiasa membela para korban kekerasan seksual dengan mendukung pengesahan RUU PKS. Ketiga, PSI akan membangun budaya baru di parlemen, yakni voters dapat mengontrol kinerja anggota legislatifnya melalui aplikasi.

Membentuk dan Menggerakkan Tim Sukses

Sejalan dengan *trend* menurunnya kapasitas mobilisasi yang dimiliki oleh partai, para calon legislatif pun membentuk tim sendiri yang kemudian dikenal dengan istilah tim sukses. Dalam konteks tersebut, Yoel Yosaphat berujar bahwa dirinya juga memaksimalkan jaringan personal yang olehnya disebut sebagai simpatisan. Dengan alasan keterbatasan dana kampanye, Yoel mengatakan bahwa tim sukses yang ia bentuk mungkin tidak semeriah konsep tim serupa yang dibuat oleh kandidat-kandidat dari partai lain, tim sukses tersebut hanya berisi teman-teman sekolahnya dulu di Santo Aloysius, komunitas game online dan beberapa rekan jamaat gereja di tempatnya beribadah.

Terlepas dari bagaimanapun format tim sukses yang dibentuk oleh para calon legislatif, hal tersebut mengindikasikan bahwa iklim politik Indonesia kontemporer beserta berbagai kebijakan kepemiluannya tidak lagi menempatkan partai sebagai satu-satunya pemain yang dominan. Kapasitas mobilisasional yang lemah dari partai2 politik telah menunjukkan sebuah bentuk alternatif organisasi kampanye, serta suatu politisasi yang kuat atas kehidupan sosial, seiring para politisi berupaya keras memadukan berbagai macam organisasi dan jejaring sosial ke dalam format kampanye pemilihan mereka (Aspinall, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jati (2016), penurunan kapasitas mobilisasional partai dalam menjangkau pemilih memiliki korelasi yang kuat dengan munculnya tradisi kerelawanan dalam trajektori pemilihan umum di Indonesia setidaknya dalam sepuluh tahun ke belakang.

Dalam kasus PSI Kota Bandung, peneliti menemukan bahwa kelemahan partai tidak hanya terletak pada sisi kapasitas mobilisasi yang terbatas, melainkan juga konsolidasi internal dan ketidaksiapan struktur partai dalam menghadapi pemilihan umum. Dikonfirmasi oleh Irfan Cahyo Narbowo, sebagai sekretaris sekaligus plt ketua DPD PSI Kota Bandung menyebut bahwa PSI

menjadi satu-satunya partai yang tidak memiliki saksi di TPS selama pemilu berlangsung, sehingga tidak mengherankan jika para calegnya banyak yang mengeluh kehilangan suara. Hasil wawancara juga menemukan bahwa seluruh legislator PSI terpilih tidak menampik bahwa mereka membentuk tim sukses masing-masing di luar anggota partai. Menurut penuturan Yoel Yosaphat, dirinya sangat terbantu dengan keberadaan tim sukses yang ia bentuk, terutama ketika melakukan kampanye *door to door* di lapangan. Tanpa bantuan tim sukses yang sebagian besar merupakan anggota keluarga dan kawan-kawan komunitasnya, Yoel merasa hampir mustahil untuk mampu merebut salah satu kursi di dapil 1. Bahkan, sebagian besar pemetaan terkait jejaring sosial dan mengidentifikasi para pemilih yang potensial untuk memilih dirinya dilakukan oleh tim sukses yang telah ia bentuk pada saat kampanye berlangsung.

Data di lapangan menunjukkan bahwa setiap tim sukses dari ketiga caleg PSI lebih didominasi oleh jejaring sosial yang berisi keluarga, teman, perkumpulan alumni dan perkumpulan hobi mereka masing-masing. Erick Darmadjaya misalnya, selama kampanye berlangsung dirinya mendapatkan sokongan dari tim informal yang diisi oleh rekan-rekannya di Perhimpunan Indonesia Tionghoa dan Perbakin Kota Bandung. Pun begitu dengan kondisi yang terjadi pada Yoel Yosaphat dan Christian Julianto Budiman, dengan alasan keterbatasan anggaran keduanya lebih banyak merekrut keluarga dekat dan teman-temannya di perkumpulan alumni santo aloysius dan persekutuan di GKPB Fajar pengharapan. Meskipun peran politik dari dimensi etnisitas di Indonesia sangatlah cair terlebih jika dibandingkan dengan India atau banyak negara di afrika (Posner, 2004), akan tetapi di sisi yang lain etnisitas tetaplah menjadi satu di anatar berbagai macam jejaring sosial yang dapat diorganisir untuk memberikan manfaat secara politis (Aspinall dan Berenschot, 2019).

2. Memenangkan Suara Kelompok Minoritas

Minoritas merupakan sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit, dibandingkan seluruh populasi suatu negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara dengan karakter etnis, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat yang lainnya, dan menunjukkan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas, yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka (Caportori, 1977). Dalam logika kuantitatif, minoritas dapat disimpulkan sebagai mereka yang jumlahnya berada di bawah 50% jumlah penduduk di wilayah tempatnya berdomisili.

Secara historis, eksistensi kelompok minoritas dalam tradisi sosial politik di Indonesia pada kenyataannya memang masih banyak diwarnai oleh memori yang negatif. Sebagaimana kasus yang terjadi pada minoritas etnis tionghoa di era orde baru yang dipaksa untuk pindah agama, mengganti nama, bahkan melakukan pernikahan antar etnis (Oh, 2017). Tidak berhenti sampai disitu, rezim korporatik orde baru juga melakukan pelarangan bagi etnis tionghoa untuk terlibat dalam politik, bahkan sekedar berorganisasi pun tidak diperkenankan (Suhandinata, 2009). Kelompok minoritas agama pun tidak jarang mengalami perlakuan yang diskriminatif, merujuk pada laporan tahunan yang dirilis oleh Komnas HAM, nyatanya masih banyak ditemukan upaya-upaya pelarangan pembangunan rumah ibadah maupun praktik-praktik peribadatan lainnya.

Akan tetapi, tumbangnya orde baru yang kemudian berganti dengan era reformasi telah menjadi pembuka jalan bagi meningkatnya partisipasi kelompok minoritas dalam hiruk pikuk politik di tanah air. Reformasi tercatat telah berhasil menghapuskan peraturan-peraturan yang membatasi hak warga negara minoritas, lebih dari itu partai-partai yang digawangi oleh minoritas mulai ramai didirikan. Sedikitnya empat partai muncul merepresentasikan kelompok minoritas

yakni, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Pembauran Indonesia dan Partai Damai Sejahtera (Juliastutik, 2010).

Mulai terbangunnya kesadaran politik kelompok minoritas juga berbarengan dengan makin meningkatnya partisipasi politik dalam berbagai ritual demokrasi di Indonesia. Hanya saja, dalam realitasnya tinggi dan rendahnya partisipasi politik minoritas juga seringkali bergantung pada kesamaan identitas dari representasi politik yang hendak mereka pilih. Kesamaan identitas agama, etnik dan budaya yang dianggap cocok menjadi pertimbangan inti bagi terwujudnya partisipasi politik minoritas (Imaduddin, 2013). Pengaruh dari kebijakan diskriminatif terhadap minoritas di masa lalu juga masih menetap dalam cara pandang sebagian kelompok minoritas sehingga tidak mengherankan jika representasi politik yang mereka dukung harus mampu melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari berbagai pertimbangan dan kecenderungan politik yang terjadi, pada pemilu tahun 2019 PSI Kota Bandung berinisiatif menjadi satu-satunya partai yang mendorong kandidat berlatar belakang minoritas pada seluruh dapil (daerah pemilihan) yang dikontestasikan. Jika ditelaah lebih jauh, keputusan partai untuk mengakomodasi etnis minoritas dalam rekrutmen politik tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab diantaranya adalah ideologi partai dan peluang dukungan suara (Suseno, 2013).

Menurut penuturan Yoel Yosaphat, struktur partai termasuk dirinya sendiri berupaya sekuat tenaga untuk mengkapitalisasi *brand* PSI yang populer dengan narasi toleransi dan multikulturalisme Indonesia. Yoel menyebut bahwa dirinya tidak memiliki modalitas dalam bentuk popularitas maupun anggaran kampanye, latar belakangnya sebagai pekerja profesional biasa pada sebuah pabrik di wilayah Cimahi tidak memungkinkannya

untuk memiliki kemewahan-kemewahan tersebut. Materi utama yang diusung selama proses kampanye dari pintu ke pintu atau yang lebih populer dengan istilah *door to door* adalah pentingnya toleransi dan perlindungan terhadap kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif. Secara umum, konstituen akan memiliki kecenderungan untuk memilih wakil-wakil yang dianggap mampu mengadvokasi isu yang menjadi kepentingan mereka. Oleh karenanya, Yoel sendiri menyebut bahwa keberhasilannya melenggang ke parlemen tidak dapat dilepaskan dari partisipasi kelompok minoritas yang disasar semasa kampanye, diluar basis suara lainnya yang juga ditargetkan. Selama kampanye berlangsung, Yoel tidak memungkiri bahwa dirinya menyasar juga kawan-kawan sekolahnya di Santo Aloysius, Universitas Katholik Parahyangan dan rekan peribadatan satu gerejanya di Bandung.

Pada penuturan yang lainnya, Christianto Julianto Budiman legislator PSI terpilih yang lain berujar bahwa dirinya mendapatkan insentif politik yang besar dari citra partai yang kuat terkait keberpihakan terhadap minoritas, menurut hasil interaksinya dengan para pemilih minoritas, Chris mendapatkan keluhan sekaligus apresiasi bahwa PSI dianggap sebagai satu-satunya partai yang berani untuk *speak up* mewakili kegelisahan mereka. Sebagai kandidat yang mengeluarkan dana paling sedikit selama kampanye, yakni 3,5 juta rupiah, Chris mengaku bahwa semasa kampanye ia tidak hanya melakukan aktifitas sosialisasi secara langsung ke lapangan, melainkan juga melalui media sosial dan internet. Strategi non tradisional melalui pemanfaatan media, baik itu sebaran iklan politik di mesin pencari atau di media sosial memang lazim terjadi di tengah akselerasi teknologi yang semakin cepat (Blodget, 2008). Chris sendiri pada dasarnya tidak hanya menargetkan kelompok minoritas sebagai lumbung suara, apalagi melakukan

pendekatan menggunakan identitas yang bersifat primordial. Akan tetapi berbagai agenda kepartaian yang cocok dengan selera kelas menengah di perkotaan memiliki korelasi dengan fakta demografis bahwa sebagian besar kelompok minoritas khususnya etnis tionghoa lebih banyak tersentralisasi di pusat-pusat perniagaan kota besar seperti Bandung.

Realitasnya, Bandung sendiri memang memiliki riwayat panjang sebagai Kota yang dihuni oleh berbagai kelompok minoritas, khususnya etnis tionghoa. Bahkan terdapat beberapa wilayah pecinan seperti jalan ABC, Banceuy, Cibadak dan Gardu Jati yang menjadi tempat bagi sebagian besar penduduk etnis tionghoa bertempat tinggal (Kunto, 1984). Dengan menjadi partai yang berani menempatkan calon legislatif berlatar belakang minoritas secara merata di seluruh dapil termasuk di wilayah-wilayah pecinan tersebut, PSI Kota Bandung berhasil meraup keuntungan dari faktor sosiologis dan tradisional dari para pemilih minoritas. Keterikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh karakter atau identitas yang dimiliki. Hubungan yang bersifat agama, etnis, dan kekerabatan adalah *item item* yang sering menjadi faktor penting dalam jalinan sebuah hubungan. Dari adanya homogenitas atau persamaan dalam agama, etnis dan diikat dengan pertalian kekerabatan menjadikan seseorang merasa nyaman dan aman. (Akbar, 2018)

Sejatinnya, peran untuk mengeksekusi berbagai strategi yang diformulasikan oleh DPD PSI Kota Bandung idealnya dikerjakan oleh Bappilu, akan tetapi menurut penuturan Irfan, konsolidasi internal partai yang tidak berlangsung sesuai yang diharapkan membuat badan ini tidak mampu bekerja dengan baik. Rombak pasang ketua badan ini bahkan terjadi sampai 3 kali selama kampanye berlangsung, oleh karenanya wajar jika muncul keluhan dari banyak

caleg yang berkontestasi terkait partai yang tidak dapat memberikan pendampingan secara maksimal. Semenjak para caleg dinyatakan lolos berbagai persyaratan administratif, DPD PSI Kota Bandung tercatat hanya melakukan 1 kali agenda pelatihan kampanye untuk para calegnya. Kondisi demikian membuat raihan partai yang bergantung pada segmentasi milenial dan khususnya kelompok pemilih minoritas tidak berjalan sesuai yang direncanakan.

SIMPULAN

Penelitian ini berkesimpulan bahwa signifikansi suara yang didapatkan oleh DPD PSI Kota Bandung merupakan buah dari pembentukan citra dan narasi sebagai partai yang anti intoleransi, dan pro terhadap keberagaman. Sekalipun bahwa hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks tengah berderaknya gelombang politik yang memiliki kecenderungan melakukan politisasi terhadap agama dalam aras politik lokal maupun nasional. Terpilihnya 3 kandidat legislator PSI Kota Bandung memiliki korelasi dengan fakta demografis bahwa ketiga daerah pemilihan tersebut memiliki angka base pemilih kelompok minoritas yang cukup tinggi. Berbagai metode kampanye yang memiliki anasir kreatif berbasis digital melalui pembentukan website partai dan media sosial menjadi sebuah terobosan yang mampu meningkatkan citra positif PSI di hadapan para pemilih.

Meskipun memiliki performa yang menjanjikan dengan berhasil secara langsung menembus parlemen di Kota Bandung, PSI masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki konsolidasi internal dan perapihan struktural partai. Beberapa kelemahan institusi kepartaian adalah kemampuan mobilisasi yang lemah menjadi prakondisi di mana para calon legislatornya harus membentuk tim kampanye yang bersifat *ad hoc* dalam bentuk tim sukses di luar perangkat kepartaian yang belum berjalan maksimal. Para pengurus DPD

PSI Kota Bandung memiliki urgensi untuk segera menata organisasi internal partainya secara konsisten. Struktur kepengurusan yang solid beserta implementasi agenda kepartaian yang dijalankan sesuai dengan konstitusi partai akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja partai dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2018). *Politik etnis tionghoa di Indonesia: Mengungkap dinamika, strategi dan partisipasi etnis Tionghoa di kancah politik pasca reformasi di Bangka Belitung*. Yogyakarta : Suluh Media.
- Adman, N. (2004). *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ambardi, K. (2016). Faktor Demografi dalam strategi elektoral Pilkada : Perspektif dari lapangan. *Dalam Jurnal Populasi*, Volume 24 Nomor 2.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aspinal, E. & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.
- Bawaslu Kota Bandung (2019). *Mengukur jejak demokrasi: Dinamika Pengawasan Pemilu 2019 Kota Bandung*, Bandung : Bawaslu.
- Blodget, J., & Lofy, Bill. (2008). *Winning Your Election The Wellstone Way: A Comprehensive Guide for Candidates & Campaign Workers*. London: University of Minnesota Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burton, M & Shea, D. (2010). *Campaign Craft: The Strategies, Tactics, and Art of Political Management*. Santa

- Barbara, California: Praeger.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Detik.com.(2019).<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4635036/ini-50-nama-anggota-dprd-kota-bandung-terpilih-periode-2019-2024>. (Diakses pada 19 Agustus 2020)
- Huckson, R.J. (1984). *Political Parties in America*. Monterey, California: Bvrooms Cole Publishing Company.
- JPnn.com.(2019).<https://www.jpnn.com/news/cara-kampanye-psi-dianggap-blunder-makanya-elektabilitas-kecil> (Diakses pada 9 Agustus 2020)
- Juliastutik, J. (2010). Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi. *Jurnal Humanity*, 6(1), 14.
- Kompas.com. (2018). <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/12132451/psi-grace-natalie-dan-citra-partai-anak-muda?page=all> (Diakses pada 9 Agustus 2020)
- Kompas.com. (2018). <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/09451171/elektabilitas-parpol-menurut-survei-terbaru-tiga-lembaga> (Diakses pada 9 Agustus 2020)
- Kunto, Haryoto. (1984). *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung: PT. Granesia.
- Jati, Wasisto.R (2016). Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial: Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 20, Nomor 2, November 2016 (147-116)
- Liliweri.A. (2005). *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LKIS.
- Margret, Anna. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Depok: Puskapol FISIP UI.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhtadi, Burhanuddin.(2018). *“Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins”*. Disertasi Ph.D., Australian Nasional University.
- Nasution.I.M. (2013). Demokrasi dan politik minoritas di Indonesia. *Jurnal Politica* Vol. 4 (11) 2.
- Oh, H. (2017). *Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Orde Baru tentang Golongan Etnis Tionghoa: Suatu Tinjauan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967*. Ilmu dan Budaya.
- Pemerintahan Republik Indonesia 2011, Undang-Undang Nomor 2/2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- PSI.ID. (2016) <https://galeri.psi.id/media-kit/item/79-abc-psi> (Diakses pada 19 Agustus 2020)
- PSI.ID. (2018) <https://psi.id/berita/2019/06/13/psi-akan-setia-perjuangkan-kepentingan-kaum-disabilitas/> (diakses pada 9 Agustus 2020)
- Robson, William (1954). *The University Teaching of Social Sciences: Political Science*. Paris: UNESCO.
- Rossiter, C. (1960). *Parties and Party Politics in Amerika*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Schroder, P (2013) *Strategi Politik* (terj.), Jakarta: friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit,
- Suhandinata, J. (2009). *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*: Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Suseno.N. (2013). *Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok : Puskapol UI.

- Tirto.id. (2016) <https://tirto.id/intoleransi-masih-tinggi-terbanyak-di-jawa-barat-cgSE> (Diakses pada 19 Agustus 2020)
- Tirto.id. (2019). <https://tirto.id/lsi-denny-ja-suara-pemilih-non-muslim-pengaruh-hasil-pilpres-2019-dga8> (diakses pada 9 Agustus 2020)